

**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo**

**Tri Suci Katili, Harun Blongkod, Lukman Pakaya**

Universitas Negeri Gorontalo

sucikatili04@gmail.com, blongkod@ung.ac.id, lukman.pakaya@ung.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the effect of implementing the Regional Government Information System (SIPD) on the quality of financial reports in the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Gorontalo Province. SIPD is implemented as an effort to increase transparency, accountability and efficiency in regional financial management. This research uses a quantitative approach with statistical analysis methods to examine the relationship between SIPD implementation and the quality of financial reports. The research results show that the implementation of SIPD has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Gorontalo Province OPD. Factors such as human resource skills, technological infrastructure, and regulatory effectiveness also contribute to the success of SIPD implementation. These findings emphasize the importance of optimizing information systems in supporting more transparent and accountable financial governance in regional government environments.*

**Keywords: SIPD, internal control system, financial reports, transparency, accountability, OPD.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. SIPD diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik untuk menguji hubungan antara penerapan SIPD, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Provinsi Gorontalo. Faktor-faktor seperti keterampilan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta efektivitas regulasi juga berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi SIPD dan sistem pengendalian internal. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi sistem informasi dan sistem pengendalian internal dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan daerah.

**Kata Kunci: SIPD, sistem pengendalian internal, laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas, OPD.**

## PENDAHULUAN

Peraturan pengelolaan keuangan daerah terus berkembang untuk mendorong pemerintahan daerah yang bersih dan baik. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang benar dan sesuai aturan. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan pemerintah ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seperti tata cara penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran kepada pemerintah pusat melalui laporan APBD dan laporan keuangan lainnya yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan secara terbuka, bertanggung jawab, dan teratur. Laporan keuangan yang dihasilkan akan diaudit oleh BPK dan disampaikan ke DPRD. Oleh karena itu, laporan ini harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.

Laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi peristiwa di masa depan. (Nur, Sopanah, & Puspitosarie, 2023) informasi yang relevan artinya ketika informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi.

Informasi yang dihasilkan dapat dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan yang disajikan berupa fakta-fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi sehingga informasi yang dihasilkan dapat diuji dan diarahkan pada kebutuhan umum tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. (Ridzal, 2020) Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Penyajian suatu laporan keuangan dapat dibandingkan apabila informasi dalam laporan tersebut dapat menjadi pembanding antara laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. (Bale, Marlina, & Muanas, 2023) Laporan keuangan yang dapat dibandingkan juga menjadi suatu syarat yang menunjukkan suatu entitas melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dapat dibandingkan artinya informasi tersebut berguna jika dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian hal tersebut dapat terjadi jika entitas tersebut menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya sehingga dapat mengetahui setiap peningkatan yang ada.

Sejalan dengan perbandingan internal dan eksternal sehingga laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. (Siahaan & Simanjuntak, 2020) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang baik menjadi semakin krusial mengingat adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola kualitas laporan keuangannya. Namun, kewenangan ini juga membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai system pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, dalam meningkatkan penilaian resiko, Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan.

Penelitian (Triono & Dewi, 2020) penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan (Rokhlinasari & Hidayat, 2016) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi penelitian (Ghita, 2019) Pengendalian internal tidak memiliki pengaruh positif signifikan dalam meningkatkan Kualitas laporan keuangan.

Pemerintah Daerah mulai menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2003. SIMDA merupakan salah satu produk dari penerapan prinsip *e-Government* yang mulai muncul saat diterbitkannya instruksi. Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang kemudian didukung oleh munculnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun SIMDA juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya (BPK menunjukkan lemahnya pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah).(Suryanto & Anggraeni, 2023). Sehingga SIMDA diganti dengan Aplikasi baru yang bernama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 Informasi tersebut terangkum dalam satu sistem yang memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam keterbukaan informasi disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Penerapan aplikasi berbentuk website ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Informasi yang ditemukan di sipd.go.id menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, didokumentasikan telah menerapkan SIPD dalam pengelolaan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerahnya meskipun masih mengalami beberapa kendala seperti proses aliran data dari tahap penganggaran hingga tahap administrasi pengelolaan keuangan daerah. Meski semuanya terlihat lancar, pemahaman SDM masih minim karena pelatihan dalam mengoperasikan SIPD masih secara mandiri atau masih menggunakan buku panduan dalam mengoperasikan SIPD, lemahnya jaringan internet di daerah karena terbatasnya kemampuan penyedia layanan jaringan internet untuk mengakses SIPD. Sehingga sistem penggajian terhambat dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran.

Menurut (Wulandari & Yuliati, 2023) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat yaitu teknologi di bidang keuangan khususnya SIPD. Pengadopsian aplikasi *web* bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah percepatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah, namun untuk mewujudkan program SIPD tidak mudah, diperlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi terkait.

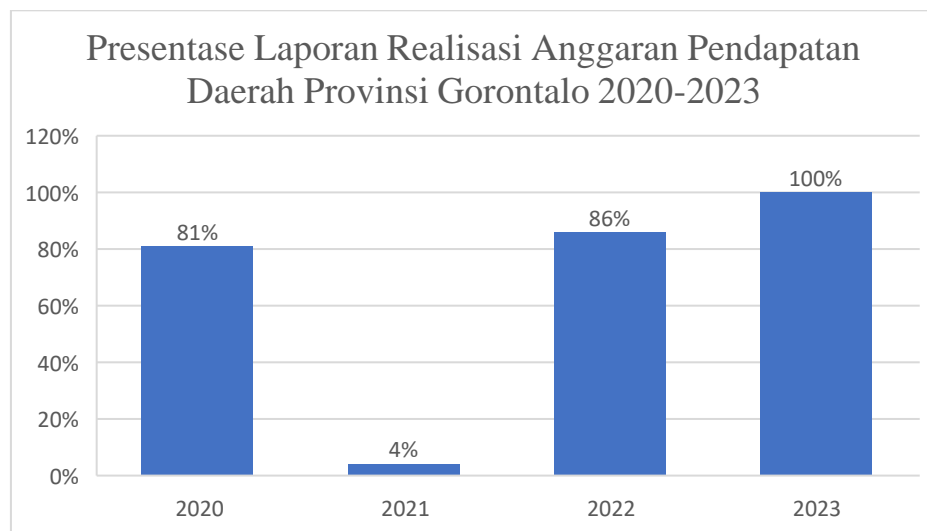
Penelitian (Rosiana Anjani, Sudrajat, & Bayu Framesthi, 2024) menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan (Sudarta, 2022)) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi penelitian (Lumuly, Atarwaman, Akuntansi, Ekonomi, & Bisnis, 2024) menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD.

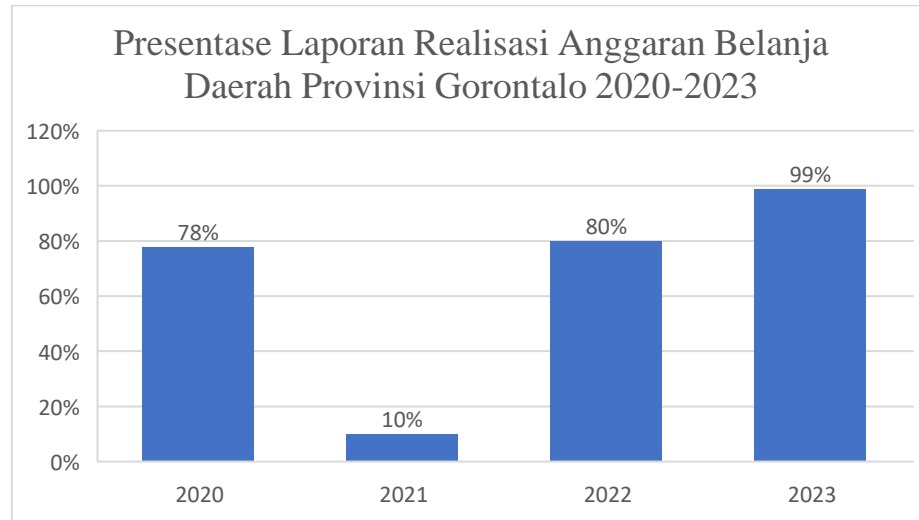
Hal ini sejalan dengan penelitian (Susanti, Barokah, & Suryaman, 2023) pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Di bawah ini menyajikan laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yang menggambarkan rincian penerimaan dan pengeluaran serta pencapaian anggaran selama periode tertentu. Data ini penting untuk memahami kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran di daerah Provinsi Gorontalo.

**TABEL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020-2023**



*Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo*



*Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu mengalami gejolak realisasi yang lebih dan/atau kurang dari 100% sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penganggaran atau salah dalam pelaksanaan anggarannya dan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hasil dari realisasi tahun 2020-2023 ini diketahui bahwa anggaran tidak direncanakan dengan baik atau tidak bertanggungjawab dalam alokasi Dana. (Septariani & Supra, 2023) SILPA merupakan selisih lebih antara selisih pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD.

Maka peneliti tertarik untuk menguji apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD. Karena SIPD merupakan hal yang baru diterapkan oleh OPD pada tahun 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif di adopsi sebagai metode utama. pendekatan ini melibatkan evaluasi pengaruh yang mungkin terjadi antar variable yang diteliti, dengan data yang dikumpulkan dipresentasikan dalam angka dan dianalisis secara statistic untuk memvalidasi hipotesis yang telah diajukan.

Menurut Sugiyono, (2019), Penelitian kuantitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, yang digunakan untuk menganalisis suatu populasi atau sampel tertentu. Metode ini

mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, dan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan temuan penelitian ini menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi responden di lapangan. Selain itu, studi ini juga memperhitungkan perbandingan dengan teori dan artikel ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Pemerintah Provinsi Gorontalo yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa kendala sehingga pemerintah provinsi gorontalo masih menggunakan aplikasi pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan nilai R-square sebesar 0,979 atau 97,9%, yang berarti kombinasi kedua variabel ini mampu menjelaskan 97,9% variasi dalam kualitas laporan keuangan. Namun, 0,21% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kehadiran teknologi pendukung dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, partisipasi aparatur sipil negara dalam pengawasan pengelolaan keuangan, dukungan regulasi yang konsisten, intensitas pelatihan bagi aparatur sipil negara, dan pengawasan eksternal dari pihak berwenang. Faktor-faktor ini berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Faktor-faktor yang berada di luar model penelitian ini, seperti teknologi pendukung, memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Partisipasi aparatur sipil negara dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan sistem informasi pemerintahan daerah. Dukungan regulasi yang konsisten memberikan panduan yang jelas bagi aparatur sipil negara dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Selain itu, intensitas pelatihan bagi aparatur sipil negara meningkatkan kemampuan teknis mereka, sementara pengawasan eksternal oleh pihak berwenang memastikan laporan keuangan memenuhi standar yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan sistem pengendalian internal bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. Begitupun dengan sistem pengendalian internal yang signifikan secara

parsial, kombinasi keduanya tetap berkontribusi positif dalam mempertanggungjawabkan kualitas laporan keuangan. Hasil ini menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada sistem pengendalian internal, tetapi juga peningkatan kualitas sistem informasi pemerintah daerah. Hal ini menekankan bahwa pemerintah provinsi Gorontalo fokus pada sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal, agar laporan keuangan lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rosiana Anjani et al., 2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh (Sudarta, 2022), yang menemukan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sambuaga, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan. Penelitian ini juga didukung oleh (Ghita, 2019), yang menemukan bahwa pengaruh pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan aparatur sipil negara dalam pengoperasian SIPD dan sistem pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh teknis pelaporan, tetapi juga oleh integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun beberapa indikator sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal sudah berada dalam kategori sangat baik/sangat tinggi, terdapat ruang untuk perbaikan dalam penyediaan informasi yang lebih rinci, distribusi manfaat program yang merata, dan penyajian data anggaran yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang hanya melibatkan aparatur sipil negara secara aktif dalam pengawasan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antar sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan. Sistem informasi pemerintahan daerah membuka akses informasi bagi aparatur sipil negara memastikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar tata kelola. Untuk itu, pemerintah organisasi perangkat daerah perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan memastikan sistem diterapkan secara efektif guna membangun kepercayaan aparatur sipil negara terhadap pengelolaan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bale, P. J., Marlina, T., & Muanas, M. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2). <https://doi.org/10.37641/jikes.v3i2.1815>
- Ghita, M. (2019). 牛 犇 1 王 储 2 宋明皓 3. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- Lumuly, E., Atarwaman, R. J. D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Intelektiva Daerah (Opd) Kota Ambon), 6(2), 147–159.
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon*, 8(2), 491–508.
- Rosiana Anjani, N. A., Sudrajat, A., & Bayu Framesthi, D. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka, 18(April).
- Sambuaga, F. R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(1), 105–124. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i1.1224>
- Septariani, J., & Supra, D. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniayah*, 6(2), 198.

<https://doi.org/10.51877/jiar.v6i2.284>

- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Sudarta. (2022). 濟無No Title No Title No Title, 16(1), 1–23.
- Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, cv. (2016).
- Suryanto, N. R., & Anggraeni, R. N. (2023). The Influence of Management Information Systems on Employee Performance with System User Satisfaction as an Intervening Variable (Survey of Simda Users In Opd Palu City). *Jurnal Sinar Manajemen*, 10(03), 259–267.
- Susanti, I. R., Barokah, R. A., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Penerapan Sipd Terhadap Kemudahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11, 163–175.
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 213–220. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 637–649.  
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6217>
- Zulfikar, T., & Aripin, Z. (2023). Influence of Competence and Application Local Government Information System ( Sipd ) Encouraging the Quality of Financial Management At the, 1–16.